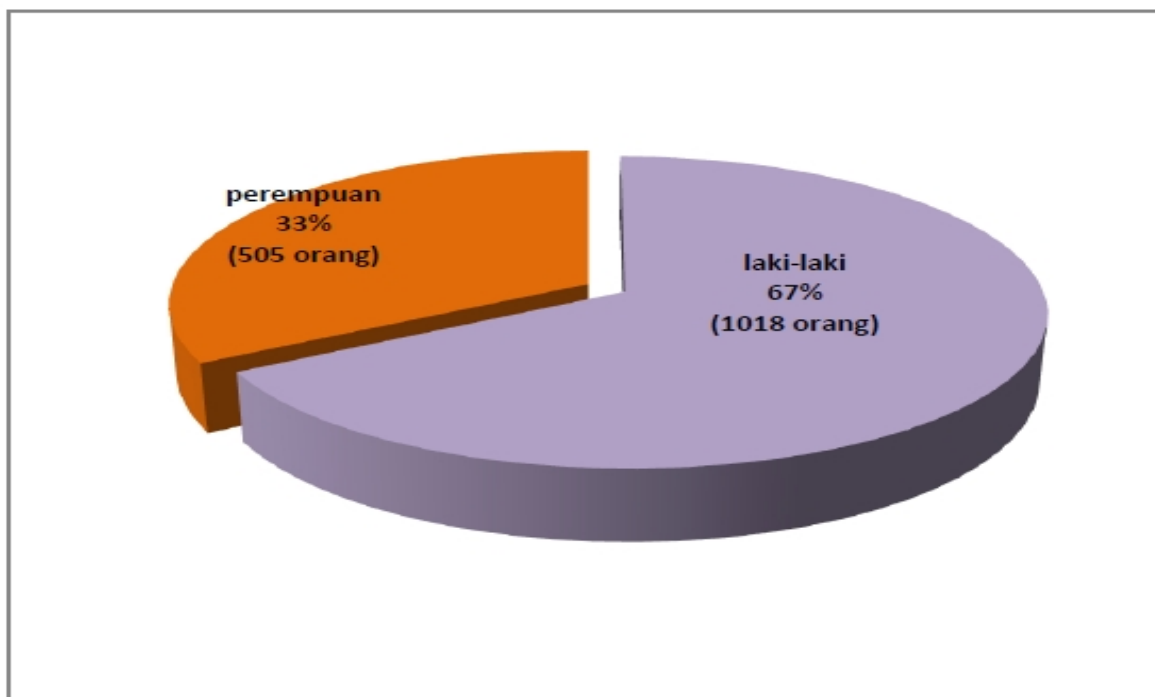
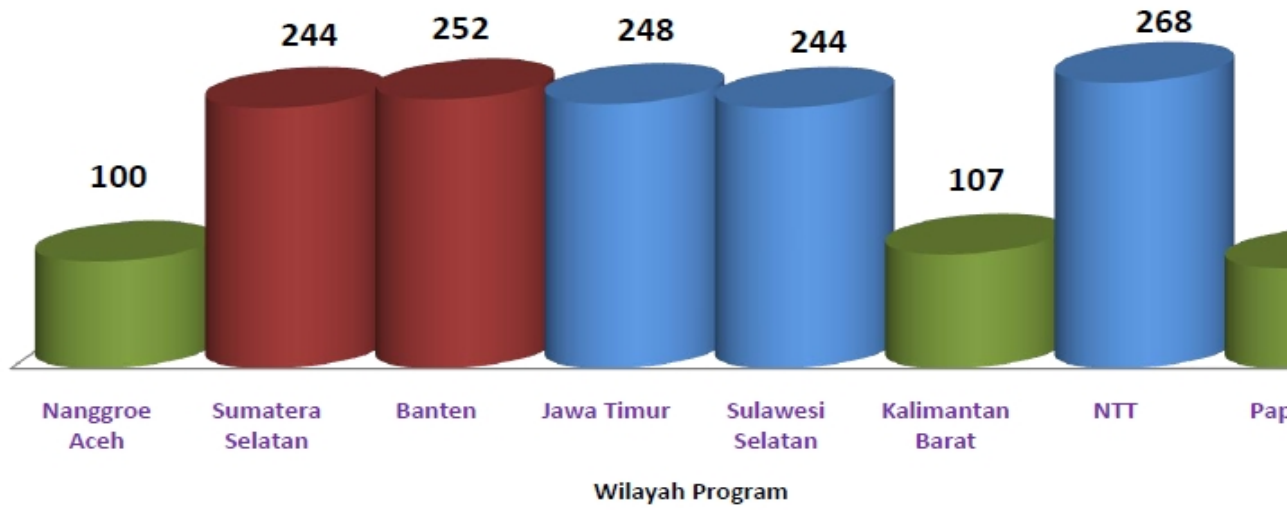


Dalam rentang waktu 8 tahun program (2006-2013), Sekolah Demokrasi telah melahirkan 1523 alumni. Para pegiat demokrasi tersebut mendapatkan pelatihan demokrasi selama 1 tahun, meliputi 3 aspek : nilai dalam demokrasi, pengetahuan terkait demokrasi, dan keterampilan dalam demokrasi. Dari 1523 alumni, 505 orang diantaranya adalah perempuan.

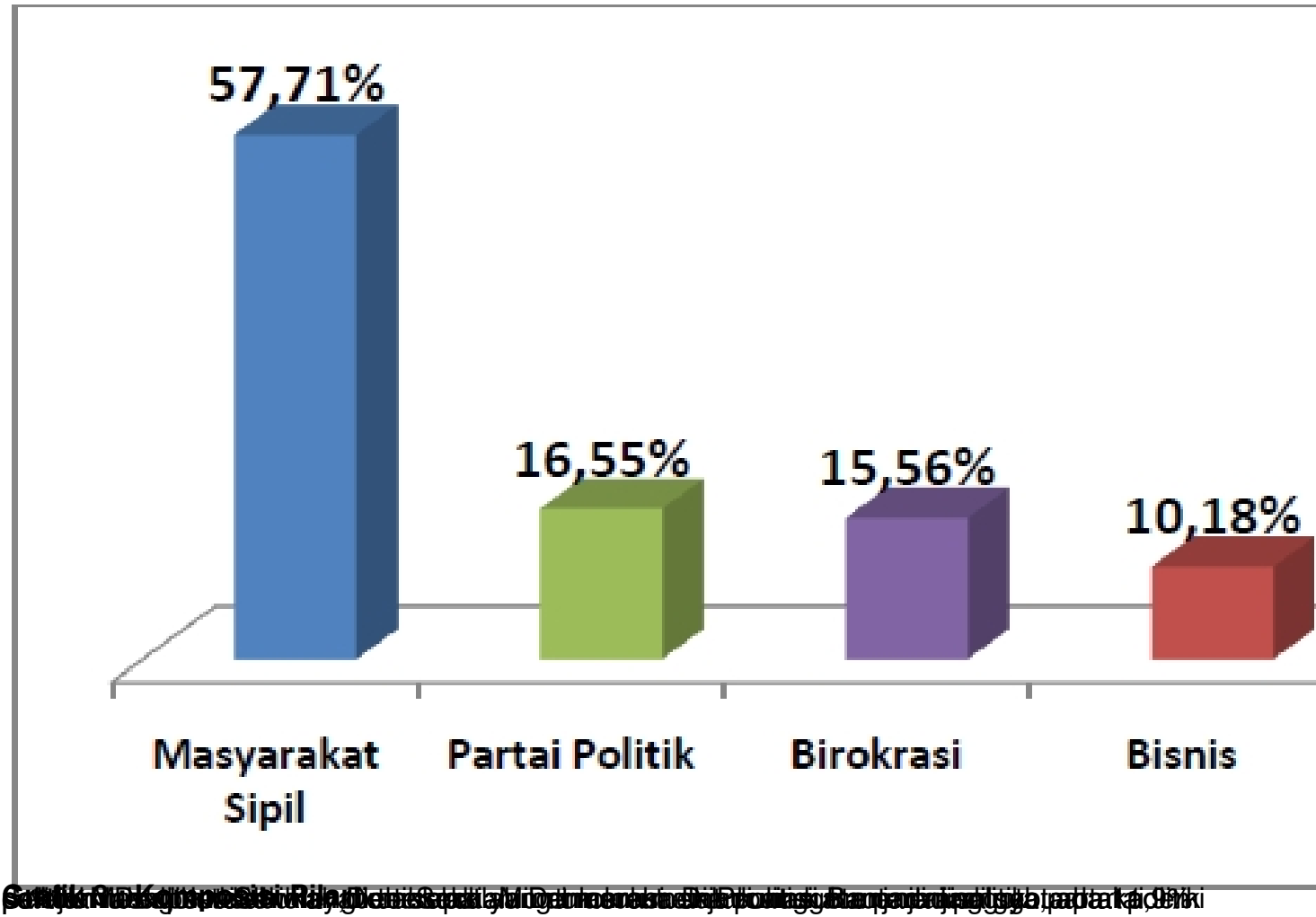


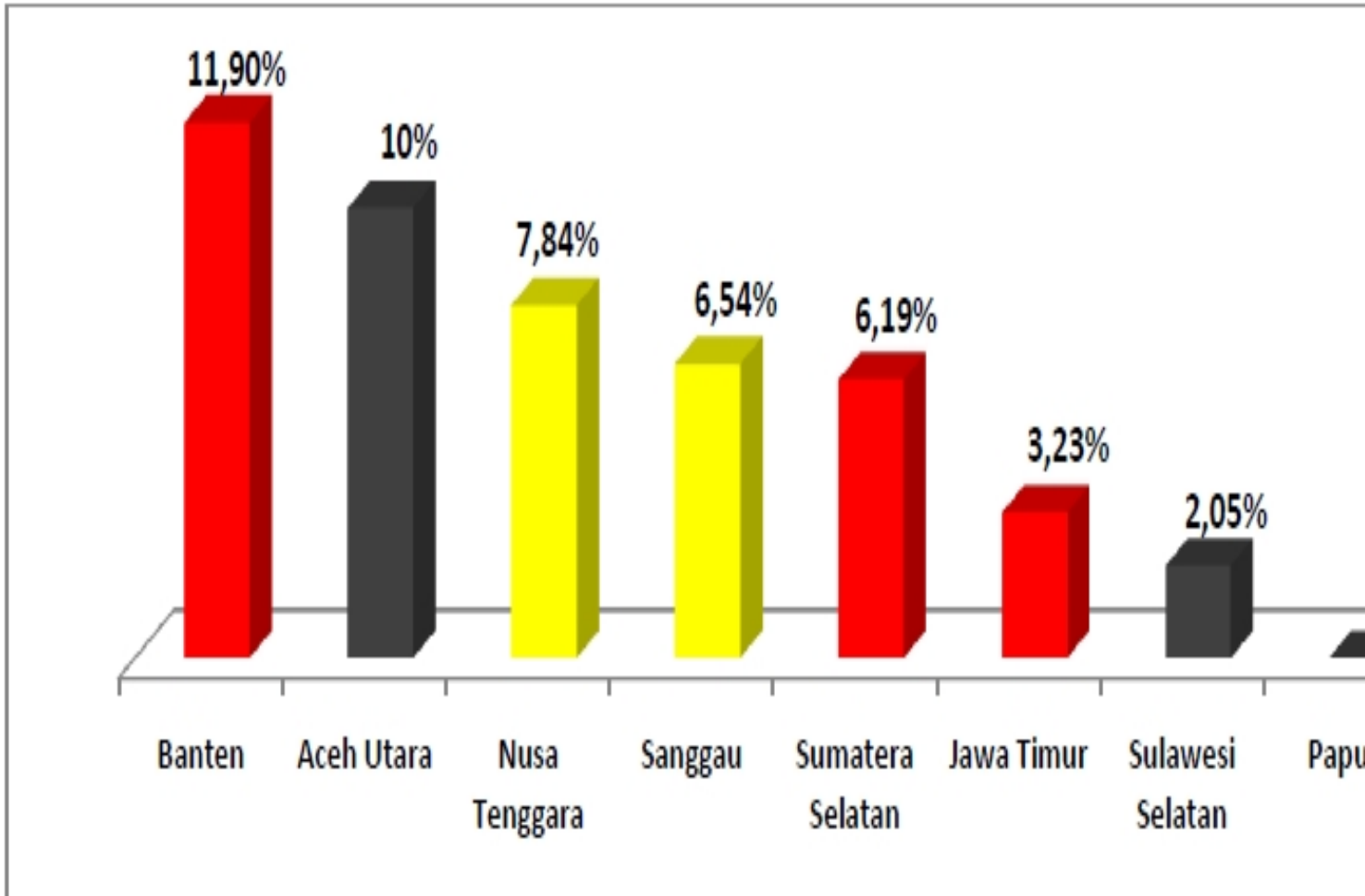
**Grafik I : Proporsi Alumni**

Jumlah alumni Sekolah Demokrasi tersebar dari barat hingga ke timur wilayah Indonesia. Program dilaksanakan di tingkat kabupaten dan berpindah ke kabupaten lain dalam kurun waktu 3-4 tahun. Pada tahun 2006, Sekolah Demokrasi pertama kali berdiri di 3 wilayah yakni Jawa Timur (kabupaten Malang), Nusa Tenggara (kabupaten Lembata), dan Sulawesi Selatan (kabupaten Jeneponto). Tahun 2007, Sekolah Demokrasi berdiri di wilayah Sumatera Selatan (kabupaten Banyuasin) dan Banten (kabupaten Tangerang). Tiga lokasi terbaru adalah di Nanggroe Aceh Darussalam (kabupaten Aceh Utara), Kalimantan Barat (kabupaten Sanggau), dan Papua (kabupaten Papua). Berikut persebaran alumni di delapan provinsi :

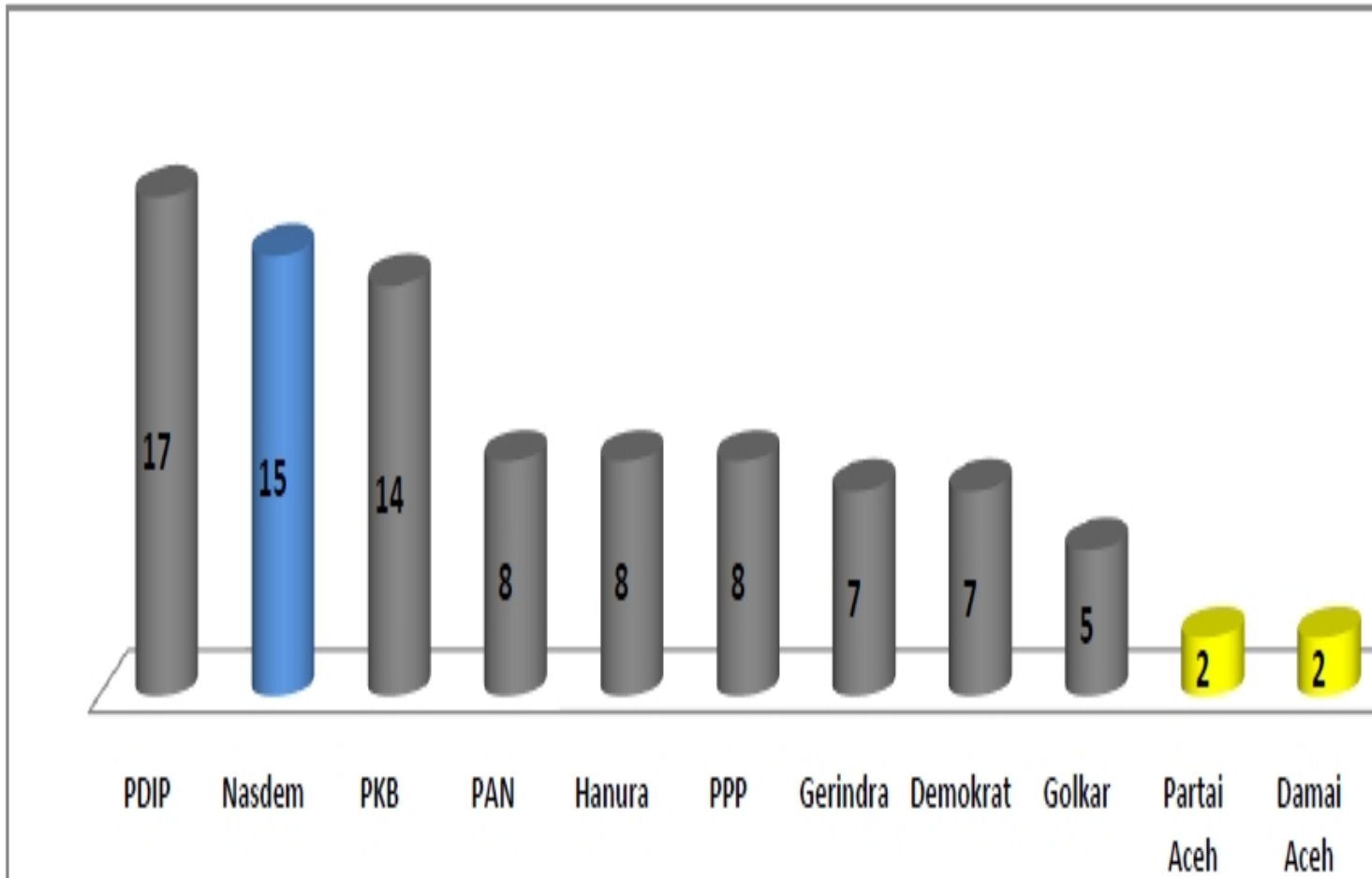


Salah satu wilayah asal mahasiswa Alumni Sekolah Demokrasi adalah mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan NTT.



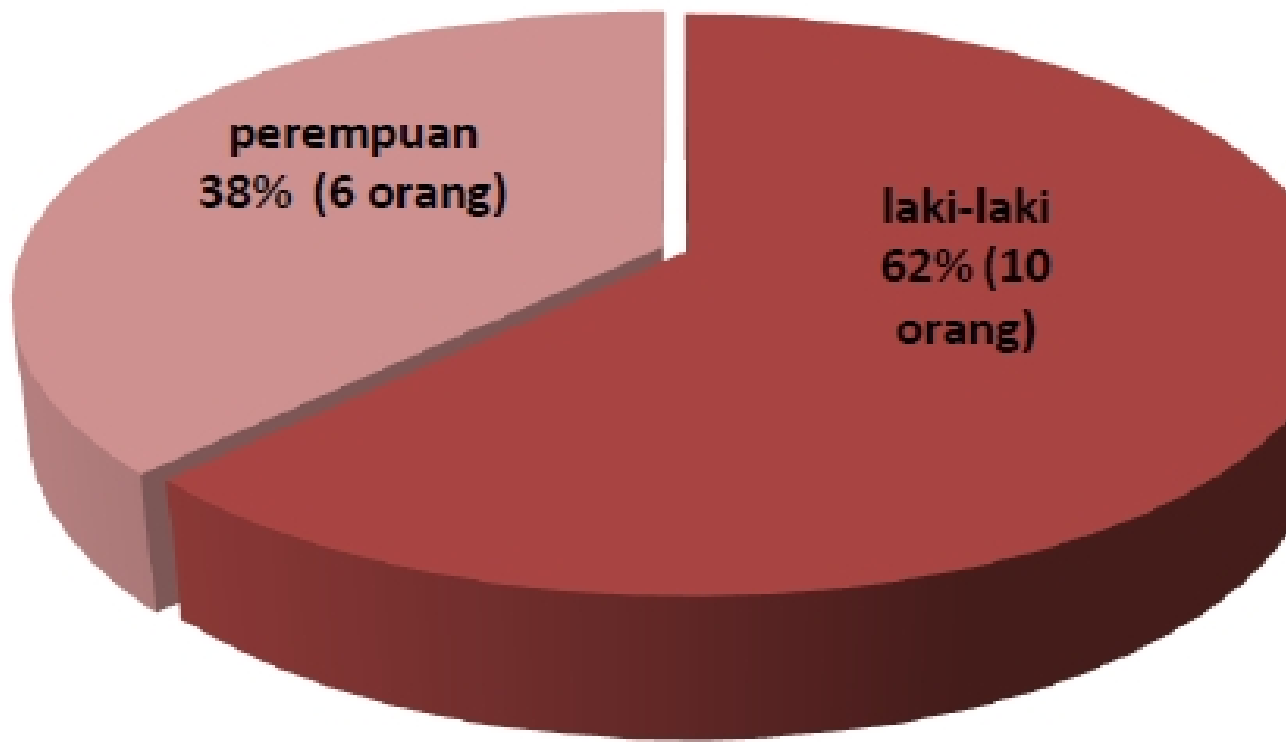


Gambar 4. Alumni Masalah Berani Politik yang dipartolokkan dan tidak pernah (dari bion

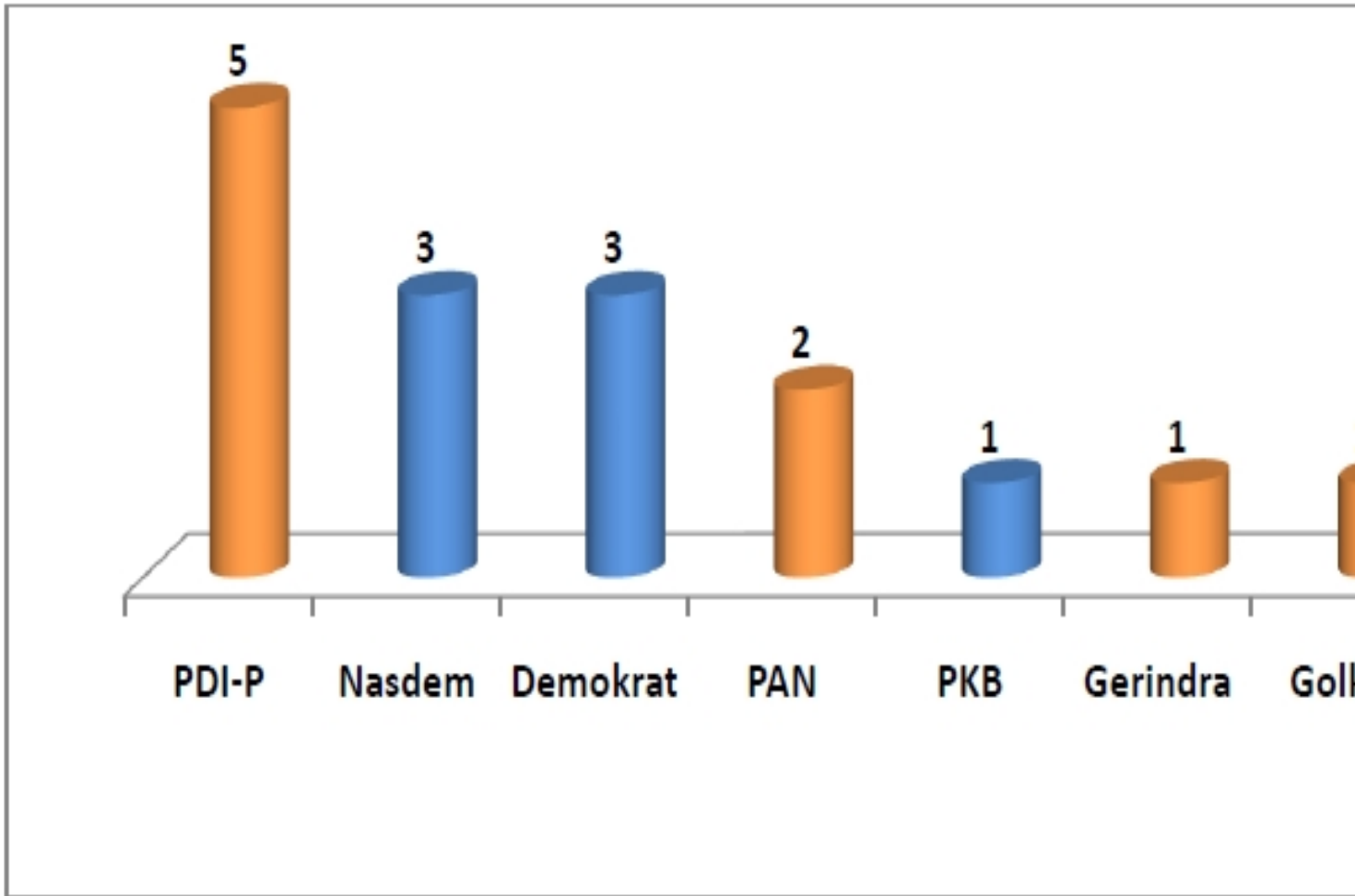


Grafik 5. Roster Anggota Alumni Sekolah Demokrasi (ASD) di DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya, 16



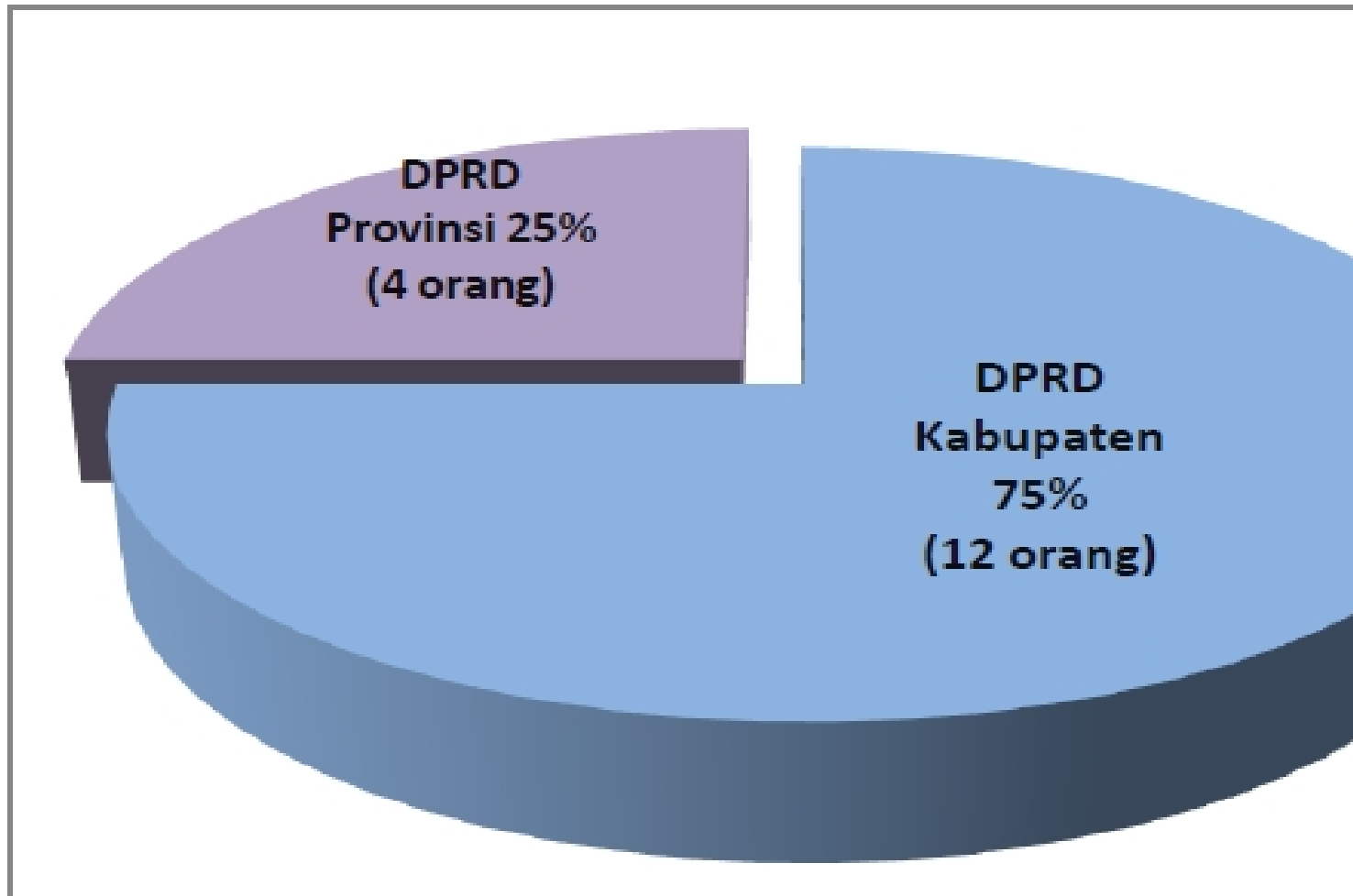


Grafik 7. Represntasi dan komposisi legislatif dari alumni SD (daerah politik).



Copyright © 2014 by Alumni Sekolah Demokrasi. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Alumni Sekolah Demokrasi.

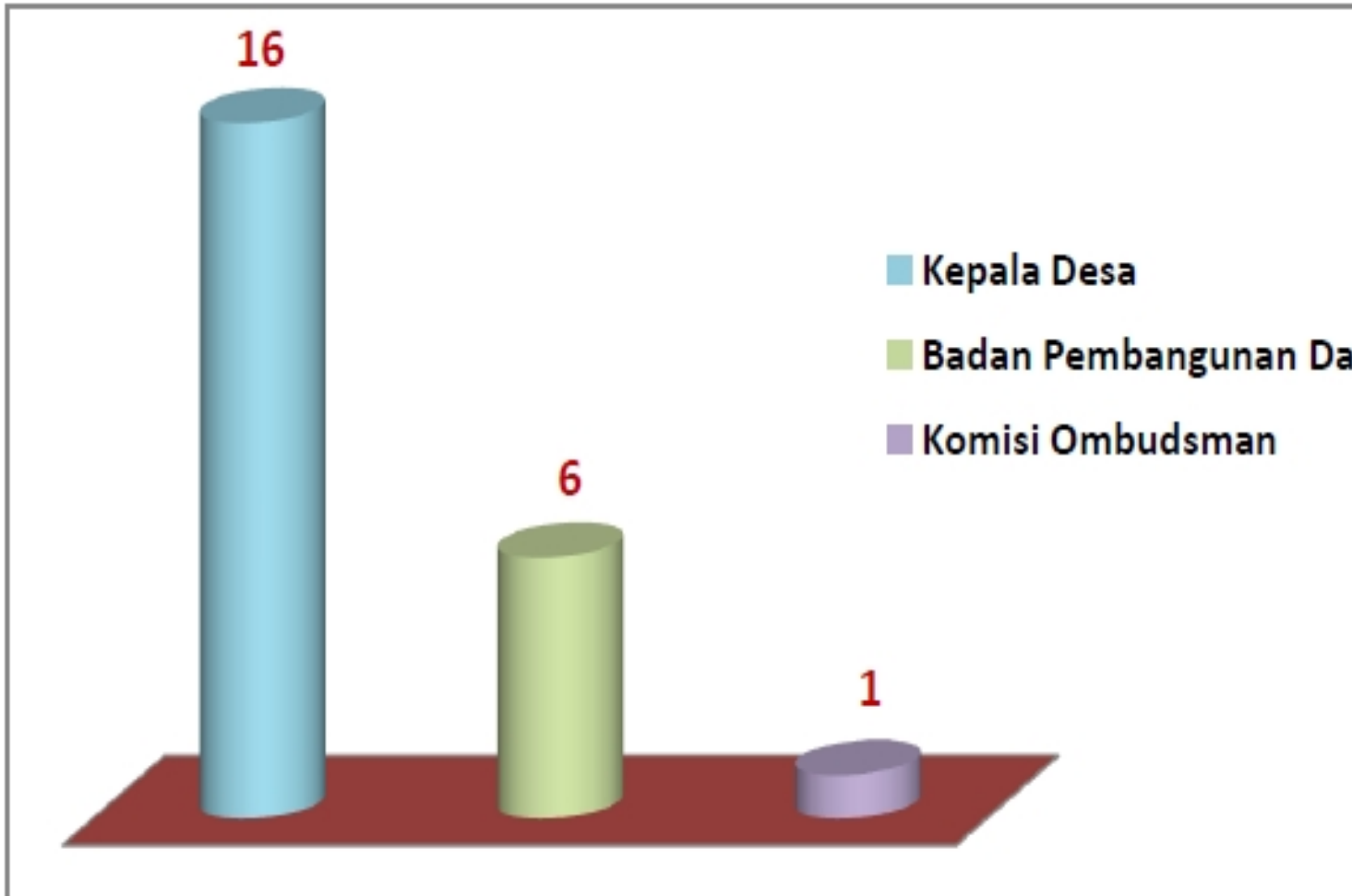




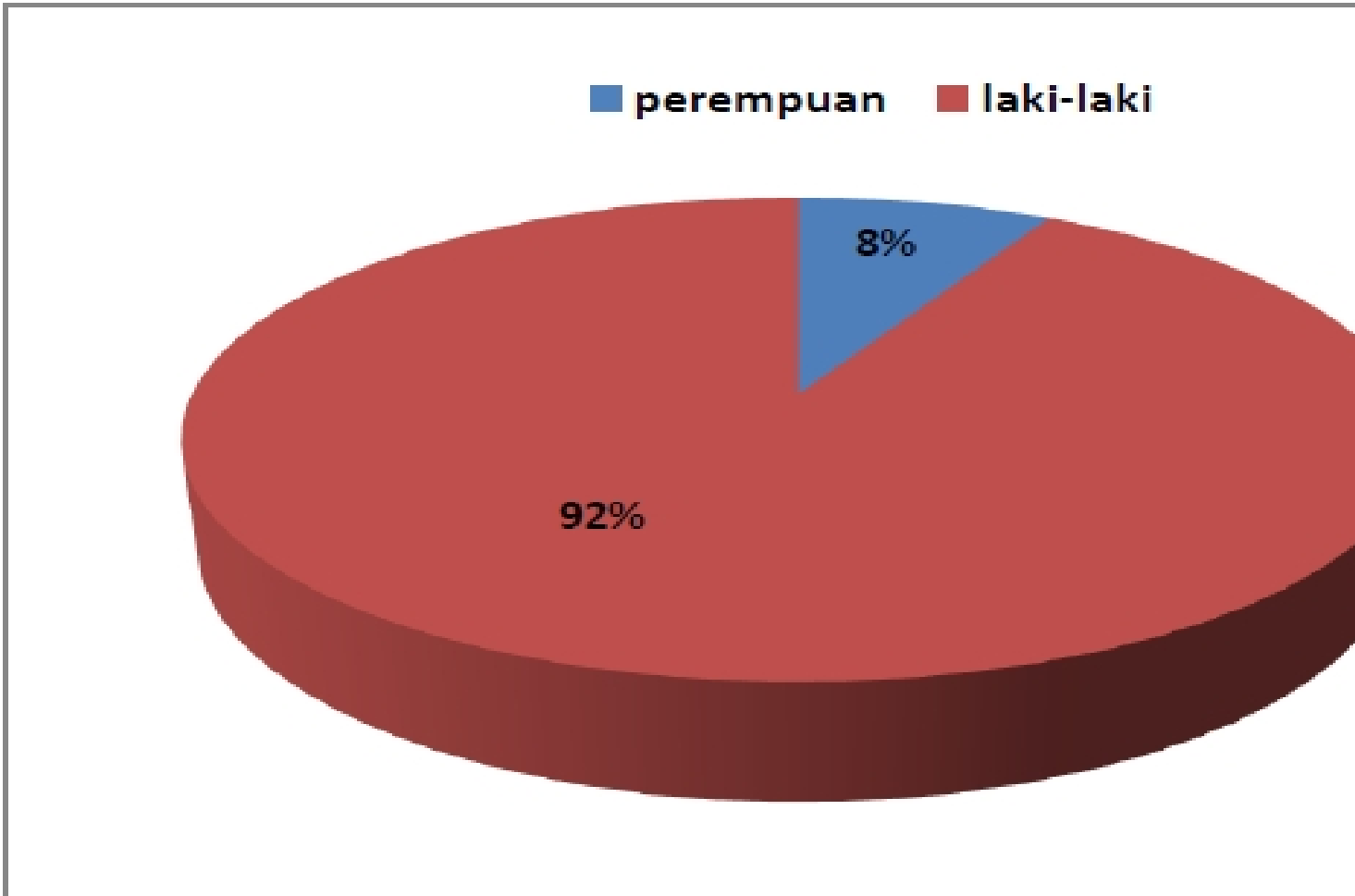
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Pangasinan adalah kualitas SDM yang rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota DPRD Kabupaten Pangasinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM DPRD Kabupaten Pangasinan.



Gambar 1.0. Alumni menjadi penyelenggara pemilu (data diambil dari Blog Alumni Demokrasi yang Berani



Grafik 13. Jumlah organisasi yang telah mengikuti pelatihan di Bekasi (77 orang) dalam persiapan



Seni dan Budaya Indonesia dan Sejarah Demokrasi dan Pembangunan (kejahat politik) dapat diasah